

Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter generasi muda

Muhamad Samin Kaslait

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadsaminkaslait@gmail.com

Kata Kunci:

Antikorupsi, Pancasila, Integritas, Karakter, Pendidikan.

Keywords:

Anti-corruption, Pancasila, Integrity, Character, Education

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi tantangan besar untuk kemajuan Indonesia karena menyebabkan kehilangan uang, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak moral nasional, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Pendidikan anti-korupsi diperlukan untuk mencegah dan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab pada generasi muda. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Studi menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang termasuk ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sekolah dan universitas memainkan peran penting dalam membangun budaya anti-korupsi melalui pembelajaran, budaya akademik, kegiatan organisasi, dan teladan pendidik. Ini diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang menjadi agen perubahan menuju Indonesia yang bebas korupsi.

ABSTRACT

Corruption remains a major challenge to Indonesia's progress because it causes financial loss, reduces the quality of public services, undermines national morale, and reduces public trust in the government and state institutions. Anti-corruption education is needed to prevent corruption and instill the values of integrity, honesty, discipline, and responsibility in the younger generation. This research method is qualitative and utilizes various literature sources, such as journals, books, and relevant scientific articles. The study shows that anti-corruption education shapes the character of a young generation with integrity by implementing the values of Pancasila, which include divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. Schools and universities play a crucial role in building an anti-corruption culture through learning, academic culture, organizational activities, and educator role models. This is expected to produce a young generation that becomes agents of change towards a corruption-free Indonesia.

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah utama yang menghambat proses pembangunan nasional Indonesia. Selain merusak kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat, korupsi merusak ekonomi dan keuangan negara. Metode ini dapat merusak prinsip etika bangsa, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Banyak kasus korupsi di berbagai sektor menunjukkan bahwa pemberantasan hanya dengan penegakan hukum belum sepenuhnya berhasil. Akibatnya, diperlukan pencegahan yang berkelanjutan melalui pendidikan untuk menanamkan prinsip antikorupsi kepada generasi muda sejak dini.



Pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dari proses membangun karakter generasi muda yang berintegritas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain mengajarkan pengertian, jenis, dan efek korupsi, pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral peserta didik sehingga mereka dapat menolak perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari (Zeid B. Smeer, Mubasyiroh, 2023). Pendidikan antikorupsi diharapkan membantu generasi muda memahami betapa pentingnya kejujuran dan keadilan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan membangun karakter yang kuat, diharapkan peserta didik dapat menjadi orang yang memiliki komitmen untuk menghindari korupsi di masa mendatang.

Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, sangat penting dalam menanamkan nilai antikorupsi kepada siswa. Pembentukan budaya akademik, kegiatan pembelajaran, perilaku jujur, dan contoh guru dapat membantu menanamkan nilai-nilai ini (Gufon, Dewi Chamidah, 2022). Sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa, generasi muda harus dilatih untuk berpikir kritis terhadap berbagai jenis penyimpangan dan korupsi yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, pendidikan antikorupsi memiliki potensi untuk menumbuhkan budaya integritas di lingkungan sekolah sehingga siswa terbiasa menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun karakter bangsa yang kuat.

Nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai dasar karakter antikorupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nilai kemanusiaan mengajarkan setiap orang untuk bertindak adil dan menghormati hak orang lain, sedangkan nilai ketuhanan mengajarkan setiap orang untuk bertindak sesuai ajaran agama dan menghindari perbuatan yang tercela (Hofi, 2024). Selain itu, prinsip persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan bebas dari korupsi. Untuk meningkatkan pembentukan karakter, pendidikan antikorupsi harus dikombinasikan dengan nilai-nilai agama. Korupsi dalam perspektif Islam termasuk perbuatan fasad atau kerusakan yang bertentangan dengan prinsip moral dan etika dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai agama dan Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan utama dalam pembentukan generasi muda yang bermoral tinggi.

Meskipun sangat penting, pendidikan antikorupsi masih menghadapi banyak tantangan di masyarakat. Beberapa tantangan yang paling umum yang dihadapi oleh guru termasuk kurangnya pemahaman guru tentang ide-ide pendidikan antikorupsi, budaya yang mengizinkan pelanggaran, dan ketidaksesuaian antara teori yang diajarkan dan realitas sosial di sekitarnya. Selain itu, jumlah kasus korupsi yang terus terjadi yang melibatkan tokoh publik dapat berdampak pada pemahaman generasi muda tentang pentingnya integritas. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara terarah dan berkesinambungan. Pendidikan antikorupsi yang efektif diharapkan akan menghasilkan generasi muda

yang kuat, jujur, dan mampu menjadi pemimpin perubahan untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi.

Sub Pendahuluan

Korupsi masih merupakan hambatan utama bagi kemajuan nasional Indonesia. Praktik korupsi merusak ekonomi dan keuangan negara, serta moral masyarakat, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jumlah kasus korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum belum berhasil mengatasi masalah ini (Uttamo & Zainudin, 2023). Akibatnya, diperlukan tindakan pencegahan melalui pendidikan anti-korupsi. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menghasilkan generasi muda yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melawan segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diharapkan bahwa pendidikan ini dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa melalui kegiatan pembelajaran, perilaku teladan guru, dan lingkungan sekolah. Pendidikan anti korupsi juga harus berpusat pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama sebagai landasan moral pembentukan karakter siswa. Namun, pendidikan anti korupsi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pendidik yang memahami tentang pendidikan anti korupsi, budaya yang terus mentolerir pelanggaran, dan tingkat kasus korupsi yang melibatkan tokoh masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan, pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama. Ini akan menghasilkan generasi muda yang kuat, jujur, dan bebas dari perilaku korupsi.

Pembahasan

Pendidikan anti korupsi adalah cara yang sangat penting untuk mencegah generasi muda tidak menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Korupsi merusak moral, budaya, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Akibatnya, penegakan hukum tidak cukup untuk memerangi korupsi; pendidikan karakter yang berkelanjutan juga diperlukan. Karena mahasiswa adalah calon penerus bangsa yang akan berperan penting dalam menentukan masa depan pembangunan negara, penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi merupakan tindakan strategis.

Pendidikan anti korupsi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, dapat membentuk karakter siswa untuk menghindari perilaku koruptif. Pendidikan anti korupsi yang didasarkan pada Pancasila tidak hanya mengajarkan siswa tentang konsekuensi dan aturan hukum yang terkait dengan korupsi, tetapi juga menanamkan kesadaran moral bahwa korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan (Isroani, Farida, 2023). Di dalam lingkungan perguruan tinggi, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan

akademik dan nonakademik dapat memperkuat budaya kejujuran dan rasa tanggung jawab.

Konsep dan Hakikat Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan anti-korupsi adalah metode pencegahan yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan integritas pada generasi muda melalui kegiatan pendidikan. Korupsi tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum tetapi juga sebagai perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moral karena dapat merugikan masyarakat dan negara. Pendidikan anti-korupsi memainkan peran penting dalam membangun moralitas siswa, mengajarkan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan mengajarkan mereka untuk menolak perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi juga dapat didefinisikan sebagai program pendidikan yang bertujuan untuk mencegah tindakan korup dan menanamkan sikap anti korupsi dalam masyarakat dan institusi pendidikan. Siswa dididik tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab melalui pelajaran ini. Sembilan prinsip dasar anti korupsi, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai ini dianggap sebagai dasar untuk membangun karakter generasi muda yang berintegritas (Abdullah Kamalsyah, 2025).

Pendidikan anti-korupsi tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan nyata melalui penerapan nilai-nilai seperti disiplin waktu, budaya antrean, transparansi organisasi, dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Siswa dapat belajar berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan prinsip moral melalui kegiatan seperti diskusi kasus, debat anti-korupsi, simulasi pelaporan pelanggaran, dan kampanye integritas (Efendi et al., 2025). Jadi, pendidikan anti-korupsi tidak hanya mengajar orang tentang bahaya korupsi, tetapi juga membangun generasi muda yang jujur dan menghargai keadilan dan kejujuran.

Peran Pancasila dan Institusi Pendidikan dalam Membentuk Karakter Antikorupsi

Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan sosial, nasional, dan negara, sehingga sangat terkait dengan pendidikan anti korupsi. Pentingnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain diajarkan oleh prinsip-prinsip ini. Dalam pendidikan anti korupsi, penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah penting untuk mengembangkan generasi muda yang bermoral tinggi dan menentang segala bentuk korupsi. Sebuah penelitian tentang pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan orang bahwa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial mendorong kesadaran bahwa korupsi dapat membahayakan masyarakat dan menghambat kemajuan nasional. Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan moral untuk mencegah generasi muda mengembangkan perilaku korupsi.

Pendidikan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral siswa, universitas dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menerapkan pendidikan anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi dapat dicapai dengan memasukkan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum, pembelajaran berbasis karakter, budaya akademik, kegiatan organisasi, dan perilaku teladan pendidik (Mulyoto, 2020). Jika siswa memahami pentingnya menjadi jujur, mereka akan sadar untuk menghindari kecurangan seperti plagiarisme, manipulasi data, dan perilaku tidak jujur lainnya. Kegiatan organisasi dan akademik di sekolah juga dapat membantu meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari.

Sangat penting bagi guru dan dosen untuk bertindak sebagai panutan dalam membentuk karakter siswa mereka. Disiplin, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab pendidik dalam kehidupan sehari-hari akan membantu menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan mereka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung budaya integritas. Jika siswa merasa ada korelasi antara nilai-nilai yang diajarkan dan praktik yang diterapkan di sekolah mereka, proses pendidikan anti korupsi akan lebih efektif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, jujur, dan berdedikasi untuk memerangi korupsi.

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan anti-korupsi membentuk karakter generasi muda dengan mendorong mereka untuk menjadi disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Korupsi dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perilaku menyimpang yang dapat merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Akibatnya, untuk memerangi korupsi, lebih dari sekadar penegakan hukum diperlukan; pendidikan karakter yang berkelanjutan diperlukan sejak usia dini, terutama di universitas, di mana para pemimpin masa depan dididik. Pendidikan anti-korupsi didasarkan pada Pancasila karena mengandung nilai-nilai moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menumbuhkan kesadaran moral siswa dan memberi mereka pemahaman bahwa korupsi bertentangan dengan etika, ajaran agama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan anti-korupsi yang didasarkan pada Pancasila membantu siswa memahami bagaimana korupsi berdampak dan bahayanya.

Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan budaya yang bermoral melalui proses pembelajaran, kegiatan organisasi, dan perilaku pendidik yang luar biasa. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, disiplin, keterbukaan, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam lingkungan akademik dapat membantu siswa menghindari perilaku yang tidak etis, seperti plagiarisme, manipulasi data, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pendidikan anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang memiliki moral, karakter, dan komitmen yang kuat untuk membangun negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Pendidikan anti-korupsi harus dilaksanakan secara

optimal dan berkelanjutan di setiap tingkatan pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Nilai-nilai anti-korupsi harus dimasukkan ke dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Sehingga siswa dapat memahami dan menumbuhkan kesadaran tentang kejujuran dan tanggung jawab secara langsung, pembelajaran anti-korupsi harus disertai dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, institusi pendidikan harus menciptakan budaya akademik yang mengutamakan keadilan, integritas, dan keterbukaan. Sebagai panutan bagi siswa melalui perilaku yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, guru dan guru sangat penting. Selain itu, keberhasilan pendidikan anti korupsi membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, agar nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam kuat pada generasi muda. Melalui pendidikan anti korupsi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, diharapkan generasi muda akan terbentuk dengan akhlak yang tinggi, integritas, dan kemampuan untuk aktif berkontribusi.

Daftar Pustaka

- Abdullah Kamalsyah, Z. H. (2025). *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Berintegritas di Indonesia*. 1(3), 45–59. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/370/194>
- Efendi, M. I., Zikrullah, M., & Nur, Y. T. (2025). *Pendidikan Antikorupsi dalam Pembentukan Integritas Generasi Muda*. 6(3), 1157–1167. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr/article/view/3163/2377>
- Gufron, Dewi Chamidah, M. A. F. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. *Laporan Penelitian*. <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/1/13574.pdf>
- Hofi, M. A. (2024). *Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila*. 1(2). <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/663/1067>
- Isroani, Farida, Z. (2023). *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik*. 6(2), 740–747. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/sus/article/view/4135/1687>
- Mulyoto, G. P. (2020). *Pengembangan modul praktikum matakuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa*. 17(1), 67–80. <https://repository.uin-malang.ac.id/5730/1/5730.pdf?>
- Uttamo, Z. V., & Zainudin, M. (2023). *PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA*. 4(1), 102–110. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/7028/pdf>
- Zeid B. Smeer, Mubasyiroh, H. (2023). *Integrasi Pendidikan Anti korupsi Berbasis Islam dalam Mata Kuliah Studi Al-Qur'an dan Hadis (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. *Jurnal Pendidikan*

Pancasila Dan Kewarganegaraan, 9(4). <https://repository.uin-malang.ac.id/17455/2/17455.pdf>